

Resume Naskah Seminar ABRI 1995 AKTUALISASI NILAI-NILAI KEJUANGAN BANGSA DALAM RANGKA MENYUKSESKAN PEMBANGUNAN NASIONAL JANGKA PANJANG KEDUA

Oleh: Saputro Satriyo

GBHN 1993 telah mengamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan pembangunan nasional dengan berpedoman kepada asas-asas pembangunan di antaranya asas kejuangan yang berintikan nilai-nilai pengabdian, ketaatan dan disiplin yang tinggi, dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Untuk itu ABRI bersama komponen kekuatan bangsa lainnya merasa terpanggil untuk memantapkan penghayatan serta menumbuhkembangkan pengamalan nilai-nilai kejuangan sebagai wujud nyata pengamalan Pancasila tersebut melalui forum Seminar Nasional tentang "Aktualisasi Nilai-nilai Kejuangan Bangsa Dalam Rangka Menyuksekan Pembangunan nasional Jangka Panjang Kedua".

Pembangunan nasional jangka panjang pertama telah berhasil menciptakan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh berkembang di atas kekuatannya sendiri. Namun masih terdapat kendala dalam upaya perwujudan kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri yang memerlukan perhatian. Terlebih bila dihadapkan kepada tantangan perkembangan lingkungan strategis, khususnya akibat globalisasi yang membawa perubahan-perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kecenderungan meningkatnya fenomena yang mengarah kepada gejala penyimpangan identitas, kepemimpinan dan budaya pada kelompok-kelompok tertentu akan dapat mengganggu kelancaran pembangunan nasional.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah melahirkan nilai-nilai kejuangan sejalan dengan citranya sebagai bangsa pejuang. Nilai kejuangan tersebut telah membentuk jatidiri bangsa dan kepribadian bangsa yang aktualisasinya juga terpengaruh oleh perkembangan zaman. Dihadapkan pada era globalisasi yang membawa pengaruh besar terhadap sistem informasi dan ekonomi dunia, apabila dikaitkan dengan tujuan dan sasaran umum pembangunan jangka panjang kedua, maka wujud pengamalan Pancasila, khususnya nilai-nilai kejuangan yang sangat menonjol dan akan senantiasa berpengaruh dominan adalah faktor cinta tanah air, semangat kompetitif dalam kemitraan yang dilandasi iman dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, jatidiri bangsa Indonesia serta disiplin nasional yang tinggi. Nilai-nilai tersebut penting untuk diselaraskan sejalan dengan faktor-faktor obyektif pembangunan sumber daya manusia, khususnya faktor-faktor yang berkaitan dengan dimensi manusia, masyarakat, penyelenggaraan negara dan sistem pembangunan nasional.

Aktualisasi nilai-nilai yang lebih dapat menjawab gelagat perkembangan lingkungan strategis akan lebih efektif bila diawali oleh pemahaman terhadap kondisi pembudayaan nilai-nilai tersebut yang telah dilaksanakan selama ini dihadapkan dengan pengaruh dominan dari perkembangan lingkungan strategis yang mengandung berbagai peluang dan kendala yang perlu diperhitungkan. Kondisi awal tersebut mencerminkan aktualisasi nilai

kejuangan bangsa di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam.

Di bidang ideologi dan politik bangsa Indonesia telah semakin menghayati dan mengamalkan Pancasila serta telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban politiknya. Sehingga partisipasi politik rakyat mulai menggembirakan. Namun demikian masih ada sebagian masyarakat yang belum mengamalkannya secara baik dan benar sehingga *pendidikan politik untuk memantapkan budaya politik dan komunikasi politik masih perlu ditingkatkan pada sebagian masyarakat*. Di bidang ekonomi telah berhasil meningkatkan derajat kehidupan bangsa Indonesia yang ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti meningkatnya pendapatan perkapita, meningkatnya nilai ekspor perdagangan non migas, meningkatnya etos kerja, daya saing yang semakin baik, berkembangnya industri dan lain sebagainya, walaupun *masih dirasakan adanya kesenjangan dan mekanisme keterpaduan usaha ekonomi yang belum lancar antara BUMN, Swasta Nasional, Koperasi dan sektor informal*. Pada sosial budaya telah dihasilkan kualitas manusia yang lebih maju, berpikir lebih kritis dengan dilandasi nilai kejuangan, kesehatan masyarakat makin baik, meningkatnya prestasi olah raga, meningkatnya mutu pendidikan dan sebagainya, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, meskipun sikap perilaku sebagian generasi muda yang cenderung masih mempraktekkan gaya hidup kosmopolitan dan konsumtif masih perlu ditingkatkan ditanggulangi diperbaiki/diluruskan. Sedangkan bidang Hankam komitmen partisipasi masyarakat telah semakin mantap. Hal ini sebagai gambaran dari tekad, jiwa dan semangat bela negara yang kuat didasari semangat persatuan dan kesatuan serta rasa cinta tanah air yang tinggi. Namun *semangat bela negara masih perlu harus digalakkan* untuk menghilangkan adanya persepsi yang menganggap bela negara tidak semata-mata tugas ABRI, di samping itu masih perlu diupayakan perwujudan peraturan-peraturan di bidang pembinaan Hankamneg.

Dengan berhasilnya PJP I, yang telah terbukti meningkatkan taraf hidup dan berpikir

masyarakat, maka peluang yang timbul di bidang ideologi dan politik berwujud Pancasila semakin diyakini oleh masyarakat sebagai satu kebenaran dan kebutuhan. Di bidang ekonomi muncul banyak peluang terutama semakin meningkatnya ketahanan dan partisipasi aktif masyarakat di dalam kegiatan ekonomi. Di bidang sosial budaya timbul peluang meningkatnya kecerdasan kehidupan bangsa serta penyesuaian diri untuk memasuki kehidupan masyarakat maju tanpa perlu kehilangan jatidiri bangsa. Di bidang Hankam dengan tetap terpeliharanya kemandirian ABRI-Rakyat memberi peluang meningkatnya stabilitas nasional yang lebih mantap. Di samping memberikan peluang, perkembangan lingkungan strategis juga telah menimbulkan kendala di bidang ideologi dan politik, yaitu meningkatnya sikap keterbukaan yang acap kali belum selaras dan tingkah laku politik yang sempit dari sebagian anggota masyarakat yang kadang-kadang mendekati ambang batas yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Kendala di bidang ekonomi, sosial budaya dan Hankam umumnya berkembang dari ekses negatif hasil pembangunan terutama di bidang ekonomi, maupun sosial budaya yang mudah berakumulasi menjadi akar masalah instabilitas keamanan. Hal yang sangat menonjol di bidang sosial budaya, terutama adalah *belum terbudayanya disiplin nasional dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat yang lebih dapat menjawab tantangan kehidupan masyarakat maju yang juga menuntut perhatian di bidang politik maupun sosial budaya*.

Pembekalan nilai-nilai untuk memperkokoh watak dan kepribadian bangsa sudah diselenggarakan secara konsisten antara lain melalui P4, Tarpadnas, Tarwaskat, PBBN, dan sebagainya, namun masalah yang layak dan perlu terus ditumbuhkembangkan secara sungguh-sungguh adalah kadar pengamalan dan penteladanannya. Oleh karena itu, maka strukturisasi nilai-nilai Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat perlu terus didorong agar menjadi sebuah gerakan nasional dalam rangka membentuk watak dan kepribadian bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang. Untuk itu perlu dikembangkan bentuk-bentuk

Resume Naskah Seminar ABRI 1995 AKTUALISASI NILAI-NILAI KEJUANGAN BANGSA DALAM RANGKA MENYUKSESKAN PEMBANGUNAN NASIONAL JANGKA PANJANG KEDUA

Oleh: Saputro Satriyo

GBHN 1993 telah mengamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan pembangunan nasional dengan berpedoman kepada asas-asas pembangunan di antaranya asas kejuangan yang berintikan nilai-nilai pengabdian, ketaatan dan disiplin yang tinggi, dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Untuk itu ABRI bersama komponen kekuatan bangsa lainnya merasa terpanggil untuk memantapkan penghayatan serta menumbuhkembangkan pengamalan nilai-nilai kejuangan sebagai wujud nyata pengamalan Pancasila tersebut melalui forum Seminar Nasional tentang "Aktualisasi Nilai-nilai Kejuangan Bangsa Dalam Rangka Menyuksekan Pembangunan nasional Jangka Panjang Kedua".

Pembangunan nasional jangka panjang pertama telah berhasil menciptakan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh berkembang di atas kekuatannya sendiri. Namun masih terdapat kendala dalam upaya perwujudan kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri yang memerlukan perhatian. Terlebih bila dihadapkan kepada tantangan perkembangan lingkungan strategis, khususnya akibat globalisasi yang membawa perubahan-perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kecenderungan meningkatnya fenomena yang mengarah kepada gejala penyimpangan identitas, kepemimpinan dan budaya pada kelompok-kelompok tertentu akan dapat mengganggu kelancaran pembangunan nasional.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah melahirkan nilai-nilai kejuangan sejalan dengan citranya sebagai bangsa pejuang. Nilai kejuangan tersebut telah membentuk jatidiri bangsa dan kepribadian bangsa yang aktualisasinya juga terpengaruh oleh perkembangan zaman. Dihadapkan pada era globalisasi yang membawa pengaruh besar terhadap sistem informasi dan ekonomi dunia, apabila dikaitkan dengan tujuan dan sasaran umum pembangunan jangka panjang kedua, maka wujud pengamalan Pancasila, khususnya nilai-nilai kejuangan yang sangat menonjol dan akan senantiasa berpengaruh dominan adalah faktor cinta tanah air, semangat kompetitif dalam kemitraan yang dilandasi iman dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, jatidiri bangsa Indonesia serta disiplin nasional yang tinggi. Nilai-nilai tersebut penting untuk diselaraskan sejalan dengan faktor-faktor obyektif pembangunan sumber daya manusia, khususnya faktor-faktor yang berkaitan dengan dimensi manusia, masyarakat, penyelenggaraan negara dan sistem pembangunan nasional.

Aktualisasi nilai-nilai yang lebih dapat menjawab gelagat perkembangan lingkungan strategis akan lebih efektif bila diawali oleh pemahaman terhadap kondisi kebudayaan nilai-nilai tersebut yang telah dilaksanakan selama ini dihadapkan dengan pengaruh dominan dari perkembangan lingkungan strategis yang mengandung berbagai peluang dan kendala yang perlu diperhitungkan. Kondisi awal tersebut mencerminkan aktualisasi nilai

kejuangan bangsa di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam.

Di bidang ideologi dan politik bangsa Indonesia telah semakin menghayati dan mengamalkan Pancasila serta telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban politiknya. Sehingga partisipasi politik rakyat mulai menggembirakan. Namun demikian masih ada sebagian masyarakat yang belum mengamalkannya secara baik dan benar sehingga *pendidikan politik untuk memantapkan budaya politik dan komunikasi politik masih perlu ditingkatkan pada sebagian masyarakat*. Di bidang ekonomi telah berhasil meningkatkan derajat kehidupan bangsa Indonesia yang ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti meningkatnya pendapatan perkapita, meningkatnya nilai ekspor perdagangan non migas, meningkatnya etos kerja, daya saing yang semakin baik, berkembangnya industri dan lain sebagainya, walaupun *masih dirasakan adanya kesenjangan dan mekanisme keterpaduan usaha ekonomi yang belum lancar antara BUMN, Swasta Nasional, Koperasi dan sektor informal*. Pada sosial budaya telah dihasilkan kualitas manusia yang lebih maju, berpikir lebih kritis dengan dilandasi nilai kejuangan, kesehatan masyarakat makin baik, meningkatnya prestasi olah raga, meningkatnya mutu pendidikan dan sebagainya, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, meskipun sikap perilaku sebagian generasi muda yang cenderung masih mempraktekkan gaya hidup kosmopolitan dan konsumtif masih perlu ditingkatkan ditanggulangi diperbaiki/diluruskan. Sedangkan bidang Hankam komitmen partisipasi masyarakat telah semakin mantap. Hal ini sebagai gambaran dari tekad, jiwa dan semangat bela negara yang kuat didasari semangat persatuan dan kesatuan serta rasa cinta tanah air yang tinggi. Namun *semangat bela negara masih perlu harus digalakkan* untuk menghilangkan adanya persepsi yang menganggap bela negara tidak semata-mata tugas ABRI, di samping itu masih perlu diupayakan perwujudan peraturan-peraturan di bidang pembinaan Hankamneg.

Dengan berhasilnya PJP I, yang telah terbukti meningkatkan taraf hidup dan berpikir

masyarakat, maka peluang yang timbul di bidang ideologi dan politik berwujud Pancasila semakin diyakini oleh masyarakat sebagai satu kebenaran dan kebutuhan. Di bidang ekonomi muncul banyak peluang terutama semakin meningkatnya ketahanan dan partisipasi aktif masyarakat di dalam kegiatan ekonomi. Di bidang sosial budaya timbul peluang meningkatnya kecerdasan kehidupan bangsa serta penyesuaian diri untuk memasuki kehidupan masyarakat maju tanpa perlu kehilangan jatidiri bangsa. Di bidang Hankam dengan tetap terpeliharanya kemanunggalan ABRI-Rakyat memberi peluang meningkatnya stabilitas nasional yang lebih mantap. Di samping memberikan peluang, perkembangan lingkungan strategis juga telah menimbulkan kendala di bidang ideologi dan politik, yaitu meningkatnya sikap keterbukaan yang acap kali belum selaras dan tingkah laku politik yang sempit dari sebagian anggota masyarakat yang kadang-kadang mendekati ambang batas yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Kendala di bidang ekonomi, sosial budaya dan Hankam umumnya berkembang dari eksek negatif hasil pembangunan terutama di bidang ekonomi, maupun sosial budaya yang mudah berakumulasi menjadi akar masalah instabilitas keamanan. Hal yang sangat menonjol di bidang sosial budaya, terutama adalah *belum terbudayanya disiplin nasional dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat* yang lebih dapat menjawab tantangan kehidupan masyarakat maju yang juga menuntut perhatian di bidang politik maupun sosial budaya.

Pembekalan nilai-nilai untuk memperkokoh watak dan kepribadian bangsa sudah diselenggarakan secara konsisten antara lain melalui P4, Tarpadnas, Tarwaskat, PBBN, dan sebagainya, namun masalah yang layak dan perlu terus ditumbuhkembangkan secara sungguh-sungguh adalah kadar pengamalan dan penteladanannya. Oleh karena itu, maka strukturisasi nilai-nilai Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat perlu terus didorong agar menjadi sebuah gerakan nasional dalam rangka membentuk watak dan kepribadian bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang. Untuk itu perlu dikembangkan bentuk-bentuk

kerja sama yang harmonis antara komponen-komponen perjuangan bangsa yang terkemuka baik ABRI maupun non ABRI, dengan mengingat ciri masyarakat yang masih cenderung paternalistik. Sejalan dengan itu, komunikasi sosial yang lebih mencerminkan faham kekeluargaan antara generasi yang dituakan, generasi motor penggerak dan generasi penerus makin menjadi harapan kehidupan bangsa di masa depan. Momentum Ulang Tahun Emas Kemerdekaan RI yang juga berada pada era Kebangkitan Nasional II, merupakan momentum yang sangat tepat untuk menggiatkan kembali penyegaran aktualisasi nilai-nilai perjuangan sebagai pengamalan Pancasila, agar bangsa Indonesia lebih potensial dan berpeluang menjadi bangsa yang maju dan mandiri yang berkemampuan menghadapi dan mengatasi berbagai pengaruh era globalisasi dalam menyukseskan PJP II.

Berdasarkan berbagai pemikiran di atas maka konsepsi aktualisasi nilai-nilai perjuangan guna menyukseskan PJP II dirumuskan melalui kebijaksanaan:

- a. Pelaksanaan aktualisasi nilai dirancang sejalan, taat asas dan merupakan sumbangan pikiran yang bersifat menjabarkan arah pola umum PJP II untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri berdasarkan Pancasila.
- b. Melibatkan seluruh potensi bangsa baik individu masyarakat, penyelenggara negara maupun sistem pembangunan nasional melalui proses pemasyarakatan, penghayatan dan pengamalan serta pelembagaan guna memperkokoh jatidiri bangsa Indonesia.
- c. Dilaksanakan secara terus-menerus, bertahap menyeluruh dengan selalu mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis guna meningkatkan Ketahanan Nasional.
- d. Peningkatan aktualisasi nilai perjuangan dilakukan dengan mengakarkannya ke dalam budaya-budaya daerah, melalui jalur pendidikan, agama dan tradisi. Untuk itu diperlukan suasana yang akrab, sistem manajemen kewilayahan yang ter-

padu antara komando ABRI, Aparatur Pemerintah dan Kepemimpinan masyarakat.

- e. Merumuskan konsep-konsep yang dijiwai asas perjuangan secara lebih rinci dan terurai di dalam GBHN.

Hal ini dimaksudkan agar para penyelenggara negara dan masyarakat dapat secara tepat menjabarkannya ke dalam dinamika pembangunan nasional.

Dalam penerapan kebijaksanaan tersebut di atas dilakukan dengan strategi pencapaian:

- a. Hakekat sasaran dari aktualisasi nilai-nilai perjuangan adalah membentuk watak dan kepribadian bangsa Indonesia, sesuai jati-dirinya sebagai bangsa pejuang.
- b. Sarana yang didayagunakan dalam aktualisasi nilai-nilai perjuangan pada dasarnya bercorak semesta, meliputi bidang pendidikan, agama dan tradisi. Untuk itu peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen serta corak kepemimpinan perlu lebih diwarnai dengan nilai-nilai perjuangan dan keteladanan, yang didukung dengan keandalan penegakan disiplin sosial dan disiplin nasional yang selaras.
- c. Wadah pembudayaan kepada masyarakat luas, pada dasarnya mendayagunakan wadah kategorial dan kewilayahan.
- d. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, internalisasi, dan institusionalisasi nilai.

Seluruh lapisan masyarakat dan penyelenggara negara harus mengembangkan kesadaran keterikatan pada misi, yang aktualisasinya diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai GBHN. Konsekuensinya bahwa tiap-tiap organisasi harus mengembangkan perannya secara proaktif, kreatif dan reflektif sesuai bidang pengabdian masing-masing, dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional. Untuk menghadapi tantangan globalisasi secara tepat, seraya memperkokoh jatidiri, watak dan kepribadian bangsa, setiap organisasi layak melakukan perenungan kembali terhadap peran pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini dikembangkan melalui pelaksanaan introspeksi, retrospeksi dan refleksi

sebagai perwujudan rasa tanggung jawab kita melalui tatanan negara kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Seluruh upaya aktualisasi nilai-nilai perjuangan bangsa harus senantiasa dilandasi oleh:

- a. Rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemerdekaan yang telah dianugerahkan-Nya kepada bangsa Indonesia, semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang terbina dengan baik.
- b. Rasa terima kasih kepada para pahlawan dan pejuang bangsa Indonesia, disertai rasa hormat yang tulus.
- c. Rasa bangga sebagai bangsa pejuang yang bertekad untuk mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Untuk itu sikap mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan ataupun perseorangan perlu makin mewarnai sendi-sendi kehidupan masyarakat.
- d. Rasa tanggung jawab untuk meratakan jalan bagi generasi yang akan datang, guna mencapai masyarakat yang maju, sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- e. Mendorong pemberdayaan masyarakat yang disertai dinamisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan perlu terus dipacu dan ditumbuh-kembangkan.
- f. Garis besar implementasi untuk mewujudkan nilai-nilai bangsa, maka dapat disimpulkan dan disarankan setidaknya pada titik berat upaya sebagai berikut:
 - 1) Di bidang *ideologi*. Meningkatnya tuntutan keterbukaan yang masih berada di bawah rambu Pancasila perlu diakomodasikan dalam struktur penyelenggaraan negara yang lebih melembaga. Oleh karena itu untuk melembagakan batas-batas keterbukaan Pancasila tersebut maka *komunikasi sosial antara lapisan generasi perlu lebih diintensifkan* dengan mendekati bahasa cendekiawan dengan bahasa ke-negaraan dan sebaliknya. Sejalan dengan ini strukturisasi nilai-nilai Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat perlu diperbaharui agar dapat lebih kondusif bagi adaptasi masyarakat luas. Selain perlu

diikuti dengan sikap keteladanan, maka P4 penting untuk terus dimasyarakatkan.

- 2) Di bidang *politik*. Dengan makin majunya taraf hidup dan tingkat berpikir masyarakat, maka diperlukan potensi yang lebih besar untuk mendinamisasi peranserta masyarakat dalam pembangunan. Untuk itu maka disarankan agar *tokoh masyarakat/ulama, para cendekiawan serta LSM, segenap aparatur negara, orsospol dan ormas sudah waktunya untuk berperan pula sebagai dinamisator dan stabilisator pembangunan bersama-sama dengan ABRI*. Peran sedemikian itu baik secara moral maupun secara hukum perundang-undangan perlu dikukuhkan sejalan dengan momentum pembangunan politik yang sedang berlangsung.
- 3) Di bidang *ekonomi*. Konglomerasi yang berfokus pada penokohan prekonomian swasta untuk mewakili daya saing perekonomian nasional dalam percaturan globalisasi masih diperlukan setidaknya sepanjang PJP II. Lebih jauh perkembangan *konglomerasi diarahkan menjadi komponen keuangan*, yang menyatu dalam "*Indonesia incorporated*". Namun demikian kesenjangan kaya miskin baik secara ekonomi maupun sosial perlu lebih diperkecil. Untuk itu konglomerasi juga harus dapat *memperbesar keterkaitan/ke-mitraan dengan perekonomian menengah dan lemah* sehingga memungkinkannya dapat berkembang selaras. Sejalan dengan itu pilar-pilar kehidupan demokrasi ekonomi yang cenderung bertolak-belakang dengan hakikat konglomerasi penting untuk terus diberdayakan dengan seni kenegarawanan yang tinggi. Masih berkait dengan upaya ini maka *jiwa kewiraswastaan juga penting ditumbuhkan* menyatu dengan pembinaan konglomerasi.
- 4) Di bidang *sosial budaya*. Dengan meningkatnya penghayatan terhadap nilai perjuangan maka *disiplin nasional perlu terus dipacu*. Untuk itu, *penteladanan* dari segenap pemimpin formal maupun non formal dan segenap aparatur negara cenderung menjadi faktor kunci kepatuhan dan kesadaran masyarakat. Hal ini perlu

dikukuhkan baik secara moral maupun secara hukum dan perundang-undangan. Prioritas penegakan disiplin akan cenderung efektif bila diletakkan pada upaya untuk *mengkibit* tempat-tempat pelayanan umum dan ketertiban di jalan-jalan raya. Karena sifatnya yang dinamis, subyek penegakkan disiplin seyogianya melibatkan dunia generasi muda di samping aparatur fungsional lainnya. Disiplin nasional diarahkan untuk menciptakan budaya tertib, budaya bersih dan budaya kerja.

5) Di bidang *Hankam*. Untuk menumbuhkan-kembangkan sikap kejuangan bela negara kepada setiap individu warga negara Indonesia, maka *undang-undang tentang kewarganegaraan Indonesia seyogianya*

tidak hanya mengidentifikasi status asal-usul dan bak-baknya semata namun juga mencantumkan kewajiban warga negara turut bertanggungjawab terhadap implementasi pasal 30 UUD 1945 khususnya turut aktif memelihara stabilitas keamanan.

Sebagai konsekuensi posisi *tut wuri handayani*”, maka peran ABRI sebagai dinamisator penting disiapkan lebih mengemuka tanpa harus mengesampingkan peranannya sebagai stabilisator pembangunan. Oleh karena itu maka pembangunan sumber daya manusia ABRI perlu lebih dikembangkan sesuai dengan tuntutan jaman.

Kol Pol Drs. Saputro Satriyo, SH adalah: Kadep Faljuang Sespim Polri, anggota Steering Komite Seminar ABRI 1995.